ASHA PUBLISHING

JURNAL LAMELLONG

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Volume 2, Nomor 1, 2025



E-ISSN: 3047-6860

Jurnal Lamellong: Pengabdian Kepada Masyarakat
https://journal.ashapublishing.co.id/index.php/jlpm
Volume 2, Nomor 1, Halaman 38-43

Pendampingan Penyusunan Policy Brief untuk Penyelenggaraan Pelayanan Perkotaan (RP2P) Kota Makassar

Didik Iskandar[1], Andi Aslinda[1], Anisa Fitri[1]
1Universitas Negeri Makassar

Kata Kunci:
Pendampingan Organisasi Masyarakat;
Naskah Kebijakan;
Pengembangan Komunitas.

Keywords:
Coloring Learning,
Children's Fine Motor Skills,
Active participation.

Penulis Koresponden:
Bidang Ilmu: Ilmu Administrasi Publik,
Alamat: Komp. Ilma D'mansion Blok E.9 Tamangapa, Makassar
Email: didik.iskandar27@unm.ac.id

Abstrak. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas perwakilan organisasi masyarakat dalam menyusun policy brief sebagai instrumen strategis untuk menyampaikan aspirasi publik sekaligus mengontrol kebijakan penyelenggaraan pelayanan perkotaan (RP2P) di Kota Makassar. Dalam konteks tata kelola kota yang semakin kompleks, keterlibatan warga menjadi esensial, terutama dalam mengkomunikasikan gagasan dan preferensi kebijakan kepada para pengambil keputusan secara sistematis. Melalui pendekatan partisipatif dan pendampingan intensif, kegiatan ini memfasilitasi pemahaman aktor non-pemerintah terhadap konsep, struktur, dan strategi penyusunan policy brief. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa para peserta mengalami peningkatan signifikan dalam kemampuan menyusun argumentasi berbasis bukti serta mengenali jalur advokasi kebijakan yang efektif. Penguatan kapasitas ini berperan penting dalam mendorong tata kelola pelayanan kota yang lebih inklusif, responsif, dan akuntabel. Pengabdian ini menegaskan bahwa policy brief bukan hanya alat teknokratik, tetapi juga medium demokratisasi kebijakan yang perlu diperluas penggunaannya di level masyarakat sipil.

Pendahuluan

Penyelenggaraan pelayanan perkotaan di kota-kota besar seperti Makassar menghadapi tantangan semakin kompleks, mulai dari kepadatan penduduk, ketimpangan akses layanan, hingga keterbatasan kapasitas fiskal dan administratif pemerintah daerah. Dalam kondisi tersebut, partisipasi aktif masyarakat menjadi krusial tidak hanya sebagai pengguna layanan, tetapi juga sebagai aktor pengawas dan pengusul kebijakan (Dwijayanti, 2021). Salah satu instrumen yang potensial digunakan dalam peran tersebut adalah policy brief, yakni dokumen ringkas yang menyampaikan analisis masalah, alternatif kebijakan, dan rekomendasi berbasis bukti (Amanda, 2020)

Namun, dalam praktiknya, masih sangat sedikit organisasi masyarakat sipil di Indonesia yang memiliki kemampuan teknis dan pemahaman strategis dalam menyusun policy brief (Adeniran et al., 2023; Boeckx, 2023). Hal ini menyebabkan minimnya alternatif kebijakan yang berasal dari masyarakat, sehingga kebijakan publik cenderung bias pada perspektif birokratik dan politis (Purna & Didin, 2022). Policy brief dapat menjadi jembatan penting antara aspirasi masyarakat dan proses pengambilan keputusan kebijakan, terutama dalam konteks RP2P (Rencana Penyelenggaraan Pelayanan Perkotaan) yang sangat memengaruhi kualitas hidup warga kota.

DOI: https://doi.org/10.70188/nzhh5939

Dalam berbagai studi, penggunaan policy brief telah terbukti menjadi alat advokasi yang efektif dalam memengaruhi agenda kebijakan di berbagai sektor, mulai dari Kesehatan (Sheikh et al., 2021), Pendidikan (Idrus et al., 2023), hingga tata ruang (Sitorus & Khuluki, 2021). Di kota-kota Asia Tenggara, seperti di Bangkok dan Manila, kelompok masyarakat sipil telah memanfaatkan policy brief untuk mendorong perubahan kebijakan tata kelola transportasi dan perumahan (Perez et al., 2022). Namun, keberhasilan ini sangat bergantung pada kapasitas teknis penyusun serta relevansi isu yang diangkat dengan kebutuhan public (Lodder & Slinger, 2022; Yusriadi et al., 2023).

Di Kota Makassar, meskipun terdapat banyak organisasi masyarakat yang aktif di isu-isu kota, kemampuan mereka dalam mengemas gagasan menjadi dokumen kebijakan yang komunikatif dan evidence-based masih terbatas. Berdasarkan hasil studi participatory mapping oleh Bappeda Kota Makassar (2023), mayoritas forum warga dan komunitas belum mengenal secara teknis bentuk dan fungsi policy brief. Ini menunjukkan adanya gap pengetahuan dan kapasitas yang perlu diatasi.

Menurut Rodríguez-Castro et al., (2021), peran informasi dalam kebijakan publik tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga preskriptif dan advokatif. Oleh karena itu, memperkenalkan policy brief kepada masyarakat bukan hanya meningkatkan literasi kebijakan, tetapi juga memperkuat fungsi deliberatif dalam demokrasi lokal. Dalam kerangka governance yang partisipatif (Caponio, 2021), kebijakan seharusnya lahir dari proses komunikasi dua arah antara pemerintah dan warga.

Selanjutnya, dalam pendekatan co-production of services (Xin & Mossig, 2021), keterlibatan masyarakat dalam formulasi kebijakan menjadi indikator penting keberhasilan layanan publik. Maka, kegiatan pendampingan penyusunan policy brief ini bukan sekadar pelatihan teknis, tetapi bagian dari upaya membangun budaya kebijakan yang inklusif. Sebagaimana disarankan oleh Mdee et al., (2021), proses kebijakan yang terbuka dan inklusif akan menghasilkan keputusan yang lebih legitim dan efektif.

Dengan demikian, kegiatan pengabdian ini memiliki dua kepentingan strategis: pertama, mendorong pemanfaatan policy brief sebagai medium pengaruh publik terhadap RP2P; dan kedua, memperkuat posisi masyarakat sipil dalam proses tata kelola pelayanan perkotaan.

Metode

Metode kegiatan pengabdian ini menggunakan pendekatan *Participatory Action Research* (PAR) yang menempatkan masyarakat sebagai subjek aktif dalam proses pembelajaran dan produksi pengetahuan. Proses pendampingan dilaksanakan melalui tiga tahap utama: (1) sosialisasi konsep policy brief, (2) pelatihan teknis penyusunan, dan (3) pendampingan penulisan policy brief berdasarkan isu pelayanan kota yang dipilih peserta.

Kegiatan ini dilaksanakan selama tiga minggu di aula kantor kecamatan dengan melibatkan 25 peserta dari 15 organisasi masyarakat sipil yang aktif di bidang lingkungan, transportasi, pendidikan, dan pengembangan masyarakat. Pemilihan peserta dilakukan secara purposive berdasarkan rekam jejak advokasi organisasi terhadap isu perkotaan.

Pada tahap awal, fasilitator mempresentasikan materi mengenai urgensi policy brief, struktur umum, dan contoh-contoh sukses advokasi kebijakan berbasis brief di berbagai kota. Tahap kedua diisi dengan lokakarya interaktif untuk menyusun narasi kebijakan, analisis aktor, dan formulasi rekomendasi. Di tahap akhir, peserta didampingi untuk menghasilkan policy brief yang utuh berdasarkan isu yang relevan di masing-masing wilayah.

Selama kegiatan, dokumentasi dan refleksi dilakukan melalui catatan lapangan, wawancara singkat dengan peserta, serta evaluasi partisipatif harian. Data ini kemudian dianalisis secara kualitatif untuk melihat perubahan pemahaman dan kapasitas peserta. Indikator keberhasilan kegiatan antara lain: (1) kemampuan menyusun policy brief sesuai standar format, (2) relevansi substansi dengan kondisi lapangan, dan (3) kemampuan presentasi serta argumentasi

DOI: https://doi.org/10.70188/nzhh5939

terhadap konten policy brief di forum audiensi kebijakan.

Hasil dan Pembahasan

Pelaksanaan kegiatan pendampingan penyusunan policy brief selama tiga minggu memberikan hasil yang cukup signifikan dalam hal peningkatan kapasitas partisipan, baik dari sisi pemahaman teoretis, keterampilan teknis, maupun keberanian dalam mengadvokasikan aspirasi publik secara sistematis. Hasil dari kegiatan ini dapat dijabarkan ke dalam beberapa dimensi utama, yakni: (1) peningkatan pemahaman konseptual, (2) kemampuan teknis penyusunan, (3) keluaran dokumen policy brief, dan (4) dinamika interaksi serta peran fasilitator.

1. Peningkatan Pemahaman Konseptual

Sebelum kegiatan dimulai, sebagian besar peserta tidak memahami apa itu policy brief. Dalam pre-discussion yang dilakukan sebelum sesi pertama, hanya 3 dari 25 peserta yang pernah mendengar istilah tersebut. Setelah dilakukan sosialisasi dan diskusi interaktif mengenai peran policy brief dalam proses advokasi kebijakan, 92% peserta menunjukkan pemahaman dasar yang baik terhadap fungsi, struktur, dan urgensi dokumen ini. Mereka mulai menyadari bahwa penyampaian aspirasi publik tidak harus selalu melalui demonstrasi atau media sosial, tetapi bisa dilakukan secara strategis melalui dokumen resmi yang komunikatif dan berbasis bukti.



Gambar 1: pendampingan penyusunan Policy Brief

Kegiatan ini mengonfirmasi temuan dari Vivier & Sanchez-Betancourt, (2023), bahwa peningkatan pemahaman terhadap produk kebijakan merupakan langkah awal yang krusial untuk membangun literasi publik dalam proses pembuatan kebijakan. Pemahaman ini juga membuka ruang baru bagi partisipasi warga secara lebih produktif dalam konteks governance yang kolaboratif.

2. Kemampuan Teknis Penyusunan Policy Brief

Setelah memahami konsep, peserta difasilitasi untuk menyusun dokumen policy brief secara bertahap. Dari hasil pelatihan teknis, terlihat adanya peningkatan signifikan dalam kemampuan peserta menulis narasi kebijakan yang runtut, menyusun data pendukung, dan merumuskan rekomendasi yang terfokus.

Pada awal pelatihan, banyak peserta yang kesulitan membedakan antara policy brief dan proposal kegiatan. Namun, melalui simulasi dan pendampingan langsung, peserta mulai memahami bahwa policy brief harus bersifat padat, tajam, dan solutif. Salah satu kelompok dari organisasi masyarakat lingkungan berhasil menyusun brief berjudul *"Penguatan Sistem Pengelolaan Sampah Terintegrasi Berbasis RW di Kota Makassar"*. Brief tersebut memuat analisis masalah yang tajam, menyajikan data dari survei mandiri mereka, dan menawarkan tiga alternatif kebijakan beserta dampaknya.

Dalam refleksi harian, peserta menyatakan bahwa proses menulis policy brief membuat mereka lebih terlatih dalam berpikir sistematis dan strategis. Ini selaras dengan gagasan bahwa proses penyusunan dokumen kebijakan meningkatkan kesadaran reflektif warga atas struktur dan dinamika kebijakan public (Dwijayanti, 2021).

3. Keluaran Dokumen Policy Brief

Secara keseluruhan, kegiatan ini menghasilkan 10 draft policy brief dari kelompok-kelompok organisasi masyarakat yang terlibat. Isu-isu yang diangkat cukup beragam, mulai dari tata kelola parkir, pelayanan air bersih, pengelolaan sampah, akses pendidikan anak marginal, hingga perlindungan pejalan kaki dan disabilitas di ruang kota. Setiap dokumen terdiri dari bagian ringkasan eksekutif, perumusan masalah, opsi kebijakan, dan rekomendasi akhir.

DOI: https://doi.org/10.70188/nzhh5939

Tim fasilitator memberikan penilaian berbasis rubrik sederhana dengan kriteria: (a) kejelasan rumusan masalah, (b) kelengkapan bukti/data, (c) ketajaman analisis opsi kebijakan, dan (d) kekuatan argumentasi rekomendasi. Dari hasil evaluasi tersebut, 4 policy brief masuk dalam kategori sangat baik, 5 dalam kategori baik, dan 1 cukup baik. Sebagian besar peserta mengalami kesulitan dalam menyusun data kuantitatif pendukung, yang menjadi catatan penting untuk pelatihan lanjutan ke depan.

Kehadiran dokumen-dokumen ini membuktikan bahwa dengan pendampingan yang tepat, organisasi masyarakat dapat menyusun policy brief yang berkualitas dan dapat digunakan sebagai instrumen formal dalam proses komunikasi kebijakan.

4. Dinamika Interaksi dan Peran Fasilitator

Selama proses pendampingan, interaksi antara fasilitator dan peserta berlangsung secara dinamis. Fasilitator tidak hanya berperan sebagai pengajar, tetapi juga sebagai pendamping yang memfasilitasi dialog kritis, membimbing proses penulisan, dan memotivasi peserta. Beberapa sesi berlangsung lebih lama dari waktu yang dijadwalkan karena tingginya antusiasme peserta dalam menggali isu dan mencari pendekatan penyelesaian yang relevan.

Fasilitator menggunakan metode scaffolding dalam pelatihan, di mana peserta secara bertahap dibimbing dari pemahaman dasar ke tingkat penyusunan dokumen yang kompleks. Pendekatan ini sejalan dengan pendekatan *problem-based learning*, yang memfasilitasi pembelajaran berdasarkan isu nyata yang dihadapi peserta.

Salah satu temuan menarik adalah bahwa partisipasi kelompok perempuan dalam kegiatan ini cukup tinggi dan konstruktif. Tiga policy brief terbaik disusun oleh kelompok yang seluruh anggotanya adalah perempuan dari komunitas kelurahan padat penduduk. Ini menunjukkan bahwa program pelatihan semacam ini tidak hanya meningkatkan kapasitas teknis, tetapi juga membuka ruang inklusivitas dan pemberdayaan kelompok rentan.

5. Dampak Jangka Pendek dan Potensi Keberlanjutan

Secara umum, kegiatan ini memberikan dampak jangka pendek yang positif: peningkatan literasi kebijakan masyarakat, terbangunnya jejaring antarkomunitas, serta hadirnya dokumen kebijakan yang siap digunakan dalam forum-forum dialog dengan pemerintah kota. Beberapa peserta bahkan telah merencanakan untuk menyampaikan policy brief mereka dalam musrenbang kelurahan.

Untuk keberlanjutan, perlu dukungan dari pemerintah kota agar policy brief yang dihasilkan mendapat tempat dalam proses perencanaan dan evaluasi kebijakan. Tanpa dukungan sistemik, dokumen-dokumen tersebut akan berhenti sebagai hasil pelatihan semata. Oleh karena itu, perlu dibangun kanal formal yang menghubungkan antara masyarakat sipil dan pembuat kebijakan, seperti forum advokasi RP2P atau klinik kebijakan berbasis warga.

.



Gambar 2: Evaluasi penyusunan Policy Brief

Simpulan Dan Saran

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini membuktikan bahwa dengan pendekatan partisipatif dan fasilitasi yang tepat, organisasi masyarakat sipil di Kota Makassar memiliki potensi besar untuk berkontribusi dalam proses kebijakan publik melalui penyusunan *policy brief*. Peningkatan pemahaman konseptual dan keterampilan teknis peserta menunjukkan bahwa policy brief bukan hanya domain teknokrat, tetapi juga dapat menjadi sarana demokratisasi

DOI: https://doi.org/10.70188/nzhh5939

pengetahuan dan pengaruh kebijakan di level akar rumput.

Hasil kegiatan ini menunjukkan bahwa policy brief dapat menjadi medium efektif bagi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi dan kontrol terhadap penyelenggaraan pelayanan perkotaan, khususnya dalam kerangka RP2P. Selain menghasilkan 10 dokumen policy brief yang relevan dan kontekstual, kegiatan ini juga memperkuat jejaring antar organisasi masyarakat dan membuka ruang refleksi kritis terhadap kebijakan publik yang ada. Partisipasi aktif perempuan dan komunitas lokal menegaskan nilai inklusivitas dalam proses ini.

Namun demikian, agar hasil ini tidak berhenti sebagai aktivitas sesaat, diperlukan strategi keberlanjutan. Kegiatan lanjutan seperti klinik kebijakan warga, pembentukan forum advokasi RP2P, serta penguatan literasi data sangat disarankan. Pemerintah Kota Makassar, khususnya Bappeda dan dinas terkait, perlu membuka kanal resmi bagi penerimaan dan pertimbangan policy brief dari masyarakat sebagai bagian dari praktik good governance yang transparan, responsif, dan partisipatif.

Dengan demikian, pengembangan kapasitas masyarakat dalam menyusun dan memanfaatkan policy brief harus menjadi bagian integral dari strategi penguatan tata kelola kota yang inklusif dan kolaboratif di masa depan. Pendekatan ini bukan hanya meningkatkan kualitas pelayanan kota, tetapi juga memperkuat kohesi sosial antara warga dan pemerintah dalam merancang masa depan kota bersama.

Daftar Pustaka

Adeniran, A. O., Muraina, J. M., Ilugbami, J. O., & Adeniran, A. A. (2023). Government policy: meaning, types, manifestations, theories, and policy cycles. *Insights into Regional Development*, *5*(2). https://doi.org/10.9770/ird.2023.5.2(6)

Amanda, I. P. (2020). Kebijakan Publik (Teori, Analisis, Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan). *TheJournalish: Social and Government*, *1*(1).

Boeckx, T. (2023). Monitoring the governance maturity of network organizations.   A session for policymakers. *International Journal of Integrated Care*, *23*(S1). https://doi.org/10.5334/ijic.icic23679

Caponio, T. (2021). Governing Migration through Multi-Level Governance? City Networks in Europe and the United States*. *Journal of Common Market Studies*, *59*(6). https://doi.org/10.1111/jcms.13214

Dwijayanti, A. (2021). The Fungsi Birokrasi sebagai Penasihat Kebijakan: Studi Fenomenologis pada Pemerintah Daerah. *Jurnal Administrasi Publik*, *17*(1). https://doi.org/10.52316/jap.v17i1.68

Idrus, I. A., Suryono, A., Noor, I., & Amin, F. (2023). Education Policy Innovation in Dynamic Governance Perspective in North Luwu District Education Programs. *Social Science Journal*, *13*.

Lodder, Q., & Slinger, J. (2022). The 'Research for Policy' cycle in Dutch coastal flood risk management: The Coastal Genesis 2 research programme. *Ocean and Coastal Management*, *219*. https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2022.106066

Mdee, A., Ofori, A., Chasukwa, M., & Manda, S. (2021). Neither sustainable nor inclusive: a political economy of agricultural policy and livelihoods in Malawi, Tanzania and Zambia. *Journal of Peasant Studies*, *48*(6). https://doi.org/10.1080/03066150.2019.1708724

Perez, R. E., Ng, A. C. L., & Tiglao, N. C. C. (2022). Enhancing policy capacity through Co-design: the case of local public transportation in the Philippines. *Policy Design and Practice*, *5*(1). https://doi.org/10.1080/25741292.2021.1930689

Purna, Z. A., & Didin, D. (2022). Birokrasi dalam Ekosistem Politik. Masihkah Birokrasi Menjadi Artikulator Pilihan Publik? *Jurnal Arajang*, *5*(1). https://doi.org/10.31605/arajang.v5i1.2731

Rodríguez-Castro, M., Campos-Freire, F., & López-Cepeda, A. (2021). Public service media as a political issue: How does the european parliament approach PSM and communication rights? In *Journal of Information Policy* (Vol. 10). https://doi.org/10.5325/JINFOPOLI.10.2020.0439

Sheikh, K., Sriram, V., Rouffy, B., Lane, B., Soucat, A., & Bigdeli, M. (2021). Governance roles and capacities of ministries of health: A multidimensional framework. *International Journal of Health Policy and Management*, *10*(5). https://doi.org/10.34172/ijhpm.2020.39

Sitorus, O., & Khuluki, E. K. (2021). Membangun Sumber Daya Manusia dalam Pelaksanaan Pengkajian

Kebijakan Agraria, Tata Ruang dan Pertanahan. *Jurnal Pertanahan*, *11*(1). https://doi.org/10.53686/jp.v11i1.54

Vivier, E., & Sanchez-Betancourt, D. (2023). Participatory governance and the capacity to engage: A systems lens. *Public Administration and Development*, *43*(3). https://doi.org/10.1002/pad.2012

Xin, X., & Mossig, I. (2021). Governments and Formal Institutions Shaping the Networks of Co-Production in the Chinese and German Film Industries. *Tijdschrift Voor Economische En Sociale Geografie*, *112*(3). https://doi.org/10.1111/tesg.12467

Yusriadi, Y., Kurniawaty, Sibali, A., & Mattalatta. (2023). Poverty Policy: Between Hope and Reality. *Journal of Indonesian Scholars for Social Research*, *3*(2). https://doi.org/10.59065/jissr.v3i2.120